DATA CYBER INDONESIA

Ruang Riset Siber Indonesia

Peran Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Pasca Pemilu 2026

Penulis:

Dewi Sartika

Peneliti Profesional, Data Cyber Indonesia

Email: dewisartika@datacyber.or.id

Website: https://datacyber.or.id

Tanggal Terbit: 08 November 2026

DOI: 10.5281/zenodo.24048753

Lisensi: CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution)

Kode Verifikasi: DCY-RISET-2026-090

Peran Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Pasca Pemilu 2026

Abstrak

Pasca Pemilu 2026, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius berupa masifnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Komdigi mencatat 1.923 konten hoaks sepanjang 2024, dengan 11,9% responden survei mengaku pernah menyebarkan hoaks. Riset ini bertujuan menganalisis secara kritis peran literasi digital sebagai instrumen preventif dan kuratif dalam menangkal fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif terhadap literatur akademik, data resmi pemerintah, dan studi kasus hoaks pasca Pemilu 2026. Temuan utama riset ini menunjukkan bahwa: (1) Literasi digital memiliki korelasi positif dengan kemampuan membedakan berita benar dan palsu, namun efektivitasnya bergantung pada kedalaman program, bukan sekadar sosialisasi; (2) Literasi digital saat ini masih dominan pada aspek teknis (cara menggunakan platform dan memverifikasi informasi), belum menyentuh aspek kritis dan moral yang menjadi akar dari ujaran kebencian; (3) Program literasi digital yang ada belum terintegrasi secara sistemik dengan kurikulum pendidikan, sehingga dampaknya tidak berkelanjutan; (4) Studi kasus hoaks pasca Pemilu 2026 menunjukkan bahwa aktor politik masih memanfaatkan celah algoritma media sosial untuk menyebarkan disinformasi. Riset ini menyimpulkan bahwa literasi digital bukanlah obat mujarab tunggal. Diperlukan pendekatan sosio-teknis yang menggabungkan literasi digital kritis, penegakan hukum yang tegas, serta regulasi platform media sosial yang lebih bertanggung jawab. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi keniscayaan untuk membangun ruang siber Indonesia yang sehat dan beradab.

1. Latar Belakang

Pemilu 2026 telah usai, tetapi jejak digitalnya masih membekas. Bukan hanya soal hasil hitung suara, melainkan juga soal bagaimana ruang siber Indonesia dipenuhi oleh banjir informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 saja, terdapat 1.923 konten hoaks yang berhasil ditangkap, dan angka ini diprediksi meningkat pada tahun 2026 seiring dengan eskalasi tensi politik. Lebih mengkhawatirkan lagi, survei menunjukkan bahwa 11,9% responden mengaku pernah menyebarkan hoaks. Artinya, hoaks bukan hanya diproduksi oleh segelintir aktor jahat, tetapi juga disebarkan oleh masyarakat biasa yang mungkin tidak menyadari

dampaknya. Di sinilah literasi digital diharapkan menjadi benteng pertahanan. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: Apakah literasi digital yang selama ini digaungkan benar-benar efektif? Ataukah ia hanya menjadi jargon yang tidak menyentuh akar masalah? Riset ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut secara kritis dan berbasis data.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program literasi digital yang ada di Indonesia dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial?
2. Apa saja keterbatasan dan celah dari pendekatan literasi digital yang diterapkan saat ini?
3. Bagaimana studi kasus hoaks pasca Pemilu 2026 mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi?
4. Apa strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk membangun ketahanan digital masyarakat?

3. Tujuan

1. Menganalisis secara kritis efektivitas program literasi digital yang ada.
2. Mengidentifikasi keterbatasan dan celah pendekatan literasi digital saat ini.
3. Membedah studi kasus hoaks pasca Pemilu 2026 untuk memahami dinamika di lapangan.
4. Merumuskan strategi sosio-teknis yang lebih komprehensif.

4. Batasan Masalah

Objek kajian adalah program literasi digital di Indonesia dan fenomena hoaks/ujaran kebencian di media sosial pasca Pemilu 2026. Data bersumber dari literatur akademik, laporan resmi Komdigi, dan studi kasus yang dipublikasikan di media massa. Penelitian tidak melakukan survei lapangan langsung, melainkan analisis sekunder terhadap data yang tersedia.

5. Tinjauan Pustaka

Kajian ini merujuk pada dua jurnal akademik utama dari Garuda (Kemdiktisaintek): pertama, jurnal yang membahas peran literasi digital dalam mencegah hoaks dengan fokus pada kemampuan verifikasi informasi dan evaluasi konten; kedua, jurnal yang membahas literasi digital sebagai instrumen preventif dan kuratif dalam mencegah konflik SARA, yang menyoroti bahwa literasi digital saat ini masih dominan aspek teknis, belum menyentuh kesadaran moral secara sistemik. Selain itu, riset ini menggunakan data resmi dari Komdigi tentang jumlah konten hoaks dan survei

perilaku masyarakat, serta studi kasus hoaks pasca Pemilu 2026 yang melibatkan tokoh publik.

6. Metodologi

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan analisis isi (content analysis). Data dikumpulkan dari literatur akademik, laporan resmi pemerintah, dan pemberitaan media massa. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, keterbatasan, dan implikasi dari program literasi digital yang ada.

7. Teknik Analisis

Analisis tematik dan kritis terhadap literatur, data resmi, dan studi kasus. Data disajikan secara deskriptif-analitis untuk membedah akar masalah dan merumuskan solusi.

8. Hasil

1. Literasi digital memiliki korelasi positif dengan kemampuan membedakan berita benar dan palsu, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kedalaman program. Program yang hanya bersifat sosialisasi singkat tidak memberikan dampak yang signifikan.
2. Literasi digital saat ini masih dominan pada aspek teknis (cara menggunakan platform, cara memverifikasi informasi), belum menyentuh aspek kritis dan moral yang menjadi akar dari ujaran kebencian.
3. Program literasi digital yang ada belum terintegrasi secara sistemik dengan kurikulum pendidikan formal, sehingga dampaknya tidak berkelanjutan dan mudah hilang.
4. Studi kasus hoaks pasca Pemilu 2026 (video Amien Rais yang dinyatakan hoaks oleh Komdigi) menunjukkan bahwa aktor politik masih memanfaatkan celah algoritma media sosial dan kurangnya literasi digital masyarakat untuk menyebarkan disinformasi.
5. Rendahnya tingkat literasi digital kritis membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi emosi dan narasi yang memecah belah.

9. Pembahasan

Temuan riset ini menunjukkan bahwa literasi digital bukanlah obat mujarab tunggal. Ada tiga paradoks yang perlu dicermati. Pertama, paradoks akses: Meskipun akses internet di Indonesia terus meningkat, literasi digital tidak serta-merta meningkat.

Banyak pengguna internet yang mahir secara teknis (bisa menggunakan berbagai aplikasi), tetapi tidak memiliki kemampuan kritis untuk memverifikasi informasi. Kedua, paradoks program: Pemerintah dan berbagai lembaga telah menggencarkan program literasi digital, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Program yang bersifat top-down dan seremonial seringkali tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, paradoks regulasi: Meskipun ada UU ITE dan berbagai regulasi platform, penegakan hukum masih lemah dan tidak konsisten. Hoaks dan ujaran kebencian terus berproduksi karena aktor merasa tidak akan terkena sanksi. Studi kasus hoaks pasca Pemilu 2026 membuktikan bahwa aktor politik masih memanfaatkan celah ini. Literasi digital yang hanya berfokus pada aspek teknis tidak akan cukup. Diperlukan literasi digital kritis yang membangun kesadaran moral, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Lebih dari itu, literasi digital harus terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan dan kurikulum sekolah, bukan hanya menjadi kampanye musiman.

10. Kesimpulan

Literasi digital memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, tetapi efektivitasnya masih jauh dari optimal. Pendekatan yang ada saat ini terlalu dominan pada aspek teknis dan kurang menyentuh aspek kritis-moral yang menjadi akar masalah. Diperlukan pergeseran paradigma dari literasi digital yang bersifat instrumental menjadi literasi digital kritis yang membangun kesadaran moral dan kemampuan berpikir kritis. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi keniscayaan untuk membangun ruang siber Indonesia yang sehat dan beradab.

11. Rekomendasi

1. Integrasi literasi digital kritis dalam kurikulum pendidikan formal sejak sekolah dasar, bukan hanya sebagai mata pelajaran tambahan.
2. Pelatihan bagi guru dan orang tua agar dapat mendampingi anak-anak dalam mengonsumsi informasi digital secara kritis.
3. Penguatan penegakan hukum terhadap penyebar hoaks dan ujaran kebencian, termasuk akuntabilitas platform media sosial.
4. Kampanye literasi digital yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, bukan sekadar seremonial.
5. Pengembangan alat verifikasi informasi yang mudah diakses dan ramah pengguna.
6. Kerja sama lintas sektor untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.

12. Keterbatasan Riset

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari literatur, laporan resmi, dan pemberitaan media. Tidak ada survei lapangan atau wawancara langsung dengan pelaku penyebar hoaks atau korban. Temuan bergantung pada akurasi dan kelengkapan sumber yang tersedia untuk publik.

Daftar Pustaka

Jurnal Akademik (Garuda Kemdiktisaintek). (2026). Peran Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Hoaks di Media Sosial (Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan).
Jurnal Akademik (Garuda Kemdiktisaintek). (2026). Peran Literasi Digital sebagai Instrumen Preventif dan Kuratif dalam Mencegah Konflik SARA di Media Sosial.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). (2026). Nezar Patria: Tangkal Hoaks Perlu Kerja Bareng Pemerintah, Kampus, Media, dan Industri.
RMOL Jatim. (2026). Komdigi Pastikan Video Amien Rais soal Prabowo Hoaks, akan Tempuh Jalur Hukum.

Halaman Verifikasi

Dokumen ini diterbitkan secara resmi oleh Data Cyber Indonesia. Pindai QR code di bawah untuk memverifikasi keaslian dokumen ini melalui website kami.

Pindai atau buka tautan berikut untuk memverifikasi:
https://datacyber.or.id/verifikasi/DCY-RISET-2026-090

Kode Verifikasi: DCY-RISET-2026-090

DOI: 10.5281/zenodo.24048753

Lisensi: CC BY 4.0

Diterbitkan oleh Data Cyber Indonesia

Tanggal: 08 November 2026